



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023



Jl. Tripandita 03, MAGETAN



0351 894209



dpmdmagetan



dpmdmagetan

**BAB 1
PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak - pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

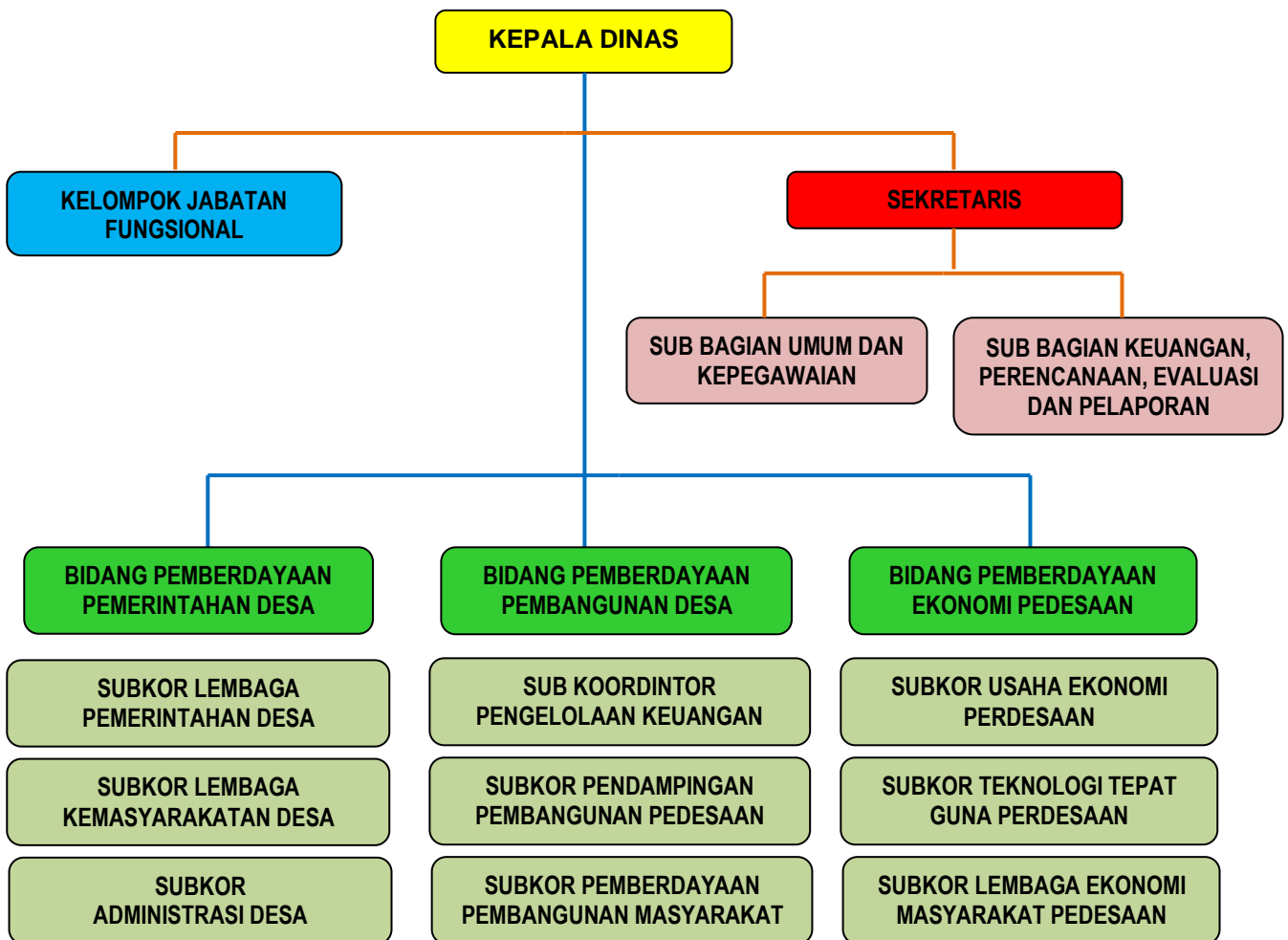
1.3.1. FUNGSI UMUM

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai :

- 1) penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 2) pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :



1.3.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mempunyai Tugas Membantu Bupati Magetan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sub Koordinator Lembaga Pemerintahan Desa; Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan Sub Koordinator Administrasi Desa
 - b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan yang terdiri atas Sub Koordinator Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan; Sub Koordinator Usaha Ekonomi Perdesaan; Sub Koordinator Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa yang terdiri atas Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa; Sub Koordinator Pendampingan Pembangunan Perdesaan; dan Sub Koordinator Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1
Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan

NO	JABATAN /BIDANG	JABATAN/SEKSI/ SUBAGIAN	FUNGSI
1.	Sekretariat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas 2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan 4. Pengelolaan urusan kepegawaian 5. Pengelolaan urusan keuangan 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai 8. Pengkoordinasian penyusunan orodgam dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang lain 9. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
2.		Sub bagian umum dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan 2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa 3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan 4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor 5. Mengurus dan mecatat barang inventrais dan perlengkapan kantor 6. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai 7. Mengurus kesejahteraan pegawai 8. Merencanakan pengelolaan arsip 9. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
		Subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran 2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung 3. Melaksanakan tata usaha keuangan 4. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 5. Melaksanakan urusan tata usahaperjalanan dinas 6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai 7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran 8. Menyusun laporan keuangan 9. Melaksanakan evakuasi dan monitoring anggaran 10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan

			<ol style="list-style-type: none"> 11. Menyiapkan dan penyusunan RENSTRA 12. Menganalisa dan menyusun rencana kerja (RENJA) 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kekuatan 14. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan 15. Menghimpun data dan menyusun SIPD, LKJip, LPPD, dan LKPJ 16. Mengelola dokumen perjanjian kinerja 17. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan SP, SOP dan SKM 18. Menyiapkan data untuk SIRUP 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
3.	Bidang Pemberdayaan pemerintahan desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas 2. Penyusunan progdam dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pemerintahan desa 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan administrasi desa 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa dan administrasi desa 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
4.	Bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan peruhdang-undangan dan kebijakan kepala dinas 2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan 4. Pembinaan dan pengendalian oelaksanaan tugas dibidang lemabga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan 5. Pemantayan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdfesaan, usaha ekonomi pedesaan dan Teknologi teoat guna perdesaan 6. Pelaksanaan fungus lain yang duberikan oleh kapala dinas

5.	Bidang pemberdayaan Pembangunan desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pembangunan desa,berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas 2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pembangunan desa 3. Pengoordinasian dan penyelenggaran tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan 4. Pembinaan dan pengendalian,pellaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pengelolaan keuangan desa,pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
----	--------------------------------------	--	---

1.3.3. SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimiliki DPMD Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut ;

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1
4.	IV/b	1
5.	IV/a	2
6.	III/d	8
7.	III/c	4

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
8.	III/b	4
9.	III/a	6
10.	II/d	2
11.	II/c	2
12.	II/b	-
13.	II/a	-
Jumlah		30

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.3

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.b	1
3.	Kepala Bidang	III.b	2
4.	Kasubag	IV.a	2
5.	PSM Ahli Muda	-	9
6.	Staf/Pelaksana	-	15
Jumlah			30

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2	3
2.	Strata 1 (S1)	18
3.	Sarjana Muda (D3)	4
4.	SLTA	5
5.	SLTP	
6.	SD	
Jumlah		30

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.5

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	4
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	7
Jumlah		11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.6

Daftar Saran Prasarana

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	unit	1
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	3
3.	Kendaraan roda 2	Unit	16
4.	Mesin Penghisap debu	Unit	1
5.	LCD proyektor	Unit	5
6.	Overhead proyektor	Unit	1
7.	Whiteboard	Unit	2
8.	Papan tulis	Unit	5
9.	Papan Nama Kantor	Unit	1
10.	Papan Pengumuman	Unit	1
11.	Papan Visuil	Unit	3
12.	Lemari Kaca	Unit	3
13.	Brankas	Unit	1
14.	Film	Unit	9
15.	Rak kayu	Unit	5

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
16.	Rak besi/metal	Unit	2
17.	Lemari besi/metal	Unit	1
18.	Mesin Hitung Manual	Unit	12
19.	<i>Keyboard</i>	Unit	2
20.	Meja Kayu pejabat eselon II	Unit	6
21.	Kursi pejabat eselon III	Unit	6
22.	Kursi kerja pejabat eselon II	Unit	2
23.	Meja rapat pejabat eselon III	Unit	4
24.	Meja kerja pegawai Non struktural	Unit	1
25.	Meja kerja pejabat eselon III	Unit	1
26.	<i>Scanner</i>	Unit	1
27.	Printer	Unit	24
28.	<i>Finger Printer</i>	Unit	1
29.	hardisk	Unit	26
30.	<i>Notebook</i>	Unit	27
31.	Laptop	Unit	17
32.	PC Unit	Unit	17
33.	Gordyn	Unit	2
34.	Handycam	Unit	1
35.	Tiang bendera	Unit	2
36.	Gambar Presiden/wakil	Unit	1
37.	Gambar garuda Pancasila	Unit	1
38.	Gerobag dorong	Unit	1
39.	<i>Tape recorder</i>	Unit	1
40.	Meja Kerja	Unit	27
41.	Kompas gas	Unit	2
42.	<i>Faximile</i>	Unit	4
43.	Pesawat telephone	Unit	3

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
44.	Sound system	Unit	1
45.	Camera	Unit	9
46.	Buffet Kaca	Unit	2
47.	Lemari arsip	Unit	6
48.	Kursi kerja pegawai	Unit	45
49.	radio	Unit	1
50.	Kipas angin	Unit	5
51.	Camera film	unit	5
52.	Wireless	Unit	1
53.	Tabung gas	Unit	1
54.	Stabilator	Unit	1

1.3.4. Pembiayaan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung oleh Anggaran. Anggaran dioptimalisasikan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

Rincian APBD 2023 yang Dikelola Dinas PMD

NO	URAIAN	Pagu	Realisasi
2.	Belanja:		
	- Belanja pegawai	3.375.559.985	3.310.580.302
	- Belanja barang dan Jasa	9.179.575.872	8.572.414.200
	- Belanja Modal	27.367.050	26.990.900
	Jumlah	12.582.502.880	11.909.985.402

1.4. SISTEMATIKA KEPENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD tahun 2018 – 2023 Kabupaten Magetan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 berlandaskan visi sebagai berikut :

“ Masyarakat Magetan Yang SMART semakin Mantab dan Sejahtera ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) **Pertama**, Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah, terampil);
- 2) **Kedua**, Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaigus ujung tombak pembangunan daerah;
- 3) **Ketiga**, Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 4) **Keempat**, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
- 5) **Kelima**, Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Visi-Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program

yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai Tugas dan Fungsi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (Dinas PMD) kabupaten Magetan, memiliki peran untuk menyukseskan strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sesuai matriks strategi dan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 maka tugas Dinas PMD ada dalam wilayah strategi **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan desa serta lembaga perekonomian di desa. Dengan kegiatan yang mendukung kebijakan, memberikan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan aset dan keuangan desa serta meningkatkan kualitas lembaga perekonomian desa.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa juga memiliki tugas dalam mendukung kesuksesan Misi Kepala Daerah – Wakil Kepala yaitu :

- **Misi Kedua**, Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;

Dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mewujudkannya melalui Program yang mengarah pada kebijakan dalam hal :

- 1) Pengembangan kelembagaan desa
- 2) Pembangunan kawasan perdesaan
- 3) Pemberdayaan masyarakat perdesaan
- 4) Peningkatan dan pengembangan lembaga perekonomian desa

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Berkategori Desa Mandiri	Jumlah Desa Berkategori Desa Mandiri Berdasarkan IDM	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kabid. Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas PMD	Skor IKM	Nilai IKM > Target	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Kabid. Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kabid. Pemberdayaan Pembangunan Desa

2.3. MATRIK HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN IKU

Tabel 2.2

Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU

VISI : Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan lebih sejahtera			
MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang baik	1.1. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	1.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah 1.1.2. Mengembangkan pola pikir dan manajemen kinerja aparatur 1.1.3. Meningkatkan fasilitas pendukung kinerja aparatur yang tepat guna dan “up to date”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur baik dalam rangka penyelenggaraan kinerja instansi maupun dalam hal tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan desa ▪ Menyediakan sarana prasarana kerja aparatur meliputi kebutuhan hardware maupun software yang layak dan terkini serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman

MISI 7 : Memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan			
2. Terbentuknya Desa Mandiri	2.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa	<p>2.1.1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.</p> <p>2.1.2. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kemasyarakatan desa melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis ▪ Membentuk rintisan e-Local Government dengan mengembangkan ocal administrasi dan layanan public berbasis aplikasi
	2.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<p>2.2.1. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan serta Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya serta Kearifan Lokal Desa.</p> <p>2.2.2. Peningkatan partisipasi aktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembinaan ocal manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan ocal budaya

		peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	<p>masyarakat serta kearifan lokal desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
	2.3 Meningkatnya perekonomian masyarakat dan keuangan desa	<p>2.3.1 Peningkatan Kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Unit-Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.</p> <p>2.3.2 Peningkatan Pemanfaatan TTG dan Pelestarian SDA yang Berwawasan Lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ; ▪ Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam tahun 2023 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Berkategori Desa Mandiri	60 Desa
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	79



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < x \leq 85$	Berhasil
$55 < x \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2023 diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Berkategori Desa Mandiri	60 Desa	78 Desa	130	Laporan IDM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Surve Kepuasan Masyarakat	79 Skor	79 Skor	100	Hasil surve SKM

Kendala/Hambatan yang terjadi dalam mencapai Sasaran Strategis:

a. Indikator: Prosentase Pasar Desa dalam Kondisi Baik

1. Anggaran rehabilitasi pasar desa sangat kurang baik yg bersumber dari DD, BKKD dan atau bantuan pemerintah pusat
2. Manajemen kelola pasar desa yg kurang profesional
3. Manajemen usaha pasar desa yg masih konservatif (jual beli tradisional)
4. Sebanyak 60 % Pasar desa belum dikelola Bundes menjadi unit usaha

b. Indikator: Prosentase BUMDesa Berkembang

1. Political will pemerintah desa sangat.kurang dalam penyertaan modal desa untuk Bumdes
2. Dukungan kemitraan strategis dari kelembagaan ekonomi desa masih kurang
3. Standar kualitas pengelola Bundes dalam menjalan program kerja. Dan dalam mengimplementasikan inovasi bisnis masih kurang
4. Masih kurangnya Goodwill pemdes dalam kerjasama pemanfaatan aset desa oleh bumdes

Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

a. Indikator: Prosentase Pasar Desa dalam kondisi baik

1. Anggaran DD multiyears dan BKKD . Butuh keberanian Pemerintah Desa
2. Manajemen kelola profesional sistem modern (1 kasir sebagai contoh)
3. Pasar desa sebagai aset desa dikelola BUMDes dengan regulasi perdes pemanfaatan aset desa sesuai Permendagri 1 tahun 2016
4. Digitalisasi layanan pasar desa yg siap sistem, manajemen dan SDM

5. Manajemen usaha pasar desa terintegrasi dalam skema bisnis unit usaha Bumdes
- b. Indikator: Prosentase BUMDes Berkembang
 1. Menggali penyertaan modal masyarakat sesuai PP 11 tahun.2021
 2. Optimalisasi pengelolaan aset desa yg telah dikerjasamakan dengan Bumdes
 3. Peningkatan kapasitas pengelola Bundes dalam manajemen bisnis, inovasi bisnis dan studi kelayakan bisnis untuk penyusunan program kerja yg sesuai potensi desa dan kondisi market

Capaian prestasi kinerja(program unggulan) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait capaian kinerja keberhasilan pembangunan desa di Magetan Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Target Desa mandiri pada tahun 2023 sebesar 28,9% atau sejumlah 60 Desa dan berdasarkan hasil penetapan IDM tahun 2023, Kabupaten Magetan terdapat 78 Desa dengan status Desa Mandiri atau sebesar 37,6 % dari jumlah seluruh desa di Kabupaten Magetan.

Meningkatnya perekonomian masyarakat dan pemerintah desa melalui BUMDesa yang menjadi roda penggerak sektor-sektor usaha ekonomi desa. Pengembangan potensi-potensi desa melalui kegiatan kerjasama antar desa yang difasilitasi oleh BUMDesma, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas PMD juga terus mendorong dan melakukan pendampingan dalam pengelolaan pasar desa sebagai penggerak perekonomian di desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.

Sasaran 4.1.: Meningkatkan Kemandirian Desa									
Indikator Kinerja	Realisasi					Kinerja 2023			Akhir Tahun RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Prosentase Desa Berkategori Desa Mandiri (%)	0	2,89	5,31	10,63	22,71	25%	37,68%	150	
Jumlah Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri (desa)	0	3	5	10	23		31		
Nilai Indeks Desa Membangun (indeks)	0,6688	0,6986	0,7178	0,7356	0,7667		0,7924		
Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju (desa)	28	47	30	25	42		18		
Jumlah Pasar Desa (unit)	37	37	37	38	55		55		
Prosentase Pasar Desa dalam Kondisi Baik (%)	29 (78,3%)	31 (83,8%)	32 (86,4%)	38 (100 %)	38 (69,09)		38 (66,6)		
Jumlah BUMDesa aktif	99	149	177	190	197 (207)		203		

di Desa (Bumdesa)					97 KUMHAM			
Prosentase BUMDesa Berkembang (%)	74 (74,7%)	75 (50,3 %)	77 (43,5 %)	90 (47,3%)	95 (48,22)		51,6 % (107 Bumdes)	
Jumlah Posyandu (posyandu)	934	934	934	932	1043		
Prosentase PosYandu Mandiri (%)	7,7	7,9	8,1	9,2	6,5 (61 posyandu)		
Indikator lain: JumlahDesaMandiri	0	6	11	22	47		78 Desa	
Keberhasilan Inovasi Program	Dinas PMD pada tahun anggaran 2023 berhasil melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan mekanisme E-Voting, dengan pelaksanaan pilkades melalui E-Voting ini menjadikan Kabupaten Magetan sebagai kabupaten pertama yang melakukan inovasi Pilkades dengan metode elektronik. Hal ini sebagai bentuk responsibility Kabupaten Magetan dalam menghadapi tantangan perkembangan era 4.0 dan menunjang upaya Kabupaten Magetan menuju Smart City.							
Catatan Lain terkait pembangunan desa mandiri	<p>Rencana Aksi: pembangunan desa mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap desa dengan status berkembang sebagai acuan arah pemberdayaan 2. Melakukan kolaborasi dengan OPD terkait dalam upaya pencapaian sasaran indeks desa membangun 3. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan sektor-sektor penggerak ekonomi desa 4. Memberikan pendampingan dalam upaya pengembangan potensi desa 5. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa 							

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2023 pada tabel diatas mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatkan kemandirian Desa
Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu “Meningkatnya Status Desa” yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni :
 1. Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri
 2. Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju
 3. Jumlah desa tertinggal yang menjadi desa berkembang
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di ukur melalui kegiatan surve kepuasan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public, dilakukan dengan melalui peningkatan kualitas SDM yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini bertujuan untuk melihat capaian peningkatan kualitas kinerja aparatur dan sebagai toak ukur dari peningkatan kinerja pada lingkup pelayanan Dinas PMD.

Adapaun beberapa faktor pendukung tercapainya target kegiatan pada tahun 2023 antara lain:

1. Terfasilitasinya dengan baik pembentukan BUMDes.
2. Sosialisasi rutin terkait regulasi kepada masyarakat dan pemerintah desa.
3. Penyusunan regulasi (PERBUB) yang sesuai dengan PP dan UU.
4. Serta pembinaan terhadap lembaga dan pemerintah desa secara massif dan berkesinambungan.

Beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja atas tujuan dan sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Tujuan dibidang Program Pemberdayaan Perekonomian Desa

Berikut ini akan diuraikan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 untuk sasaran Meningkatkan Lembaga Perekonomian Desa di pedesaan :

Tabel 3.4
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR	REALISASI (2022)	TARGET (2023)	REALISASI (2023)
Jumlah BUMDes Aktif	197	207	203
Jumlah Pasar Desa dengan kondisi baik	38	38	38
Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna	30	60	60

Upaya Meningkatkan Perekonomian rumah tangga miskin (RTM) dilaksanakan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan perekonomian masyarakat desa dan juga memfasilitasi pelaku usaha industri mikro perdesaan di Kabupaten Magetan. Hasilnya adalah:

- Jumlah Desa yang memiliki BUMDes tahun 2022 sebanyak 197 desa meningkat menjadi 207 desa pada tahun 2023. Dari 207 BUMDes yang aktif sebanyak 203 BUMDes, pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dilakukan melalui kegiatan pelatihan manajemen usaha, pendampingan program dan bantuan permodalan. Kesadaran desa untuk menguatkan posisi, fungsi BUMDes dalam upaya meningkatkan dinamika perekonomian desa. Pada tahun 2023 ini, pendampingan BUMDes diarahkan dalam kerangka kegiatan ekonomi produktif perdesaan.
- Jumlah pasar desa dengan kondisi baik pada target 2022 sebanyak 37 pasar desa. Dalam upaya mencapai target tersebut dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku pengelola pasar desa, baik dari segi administrasi pasar dan peningkatan SDM pengelola pasar desa sehingga realisasi yang dicapai pada tahun 2022 sebanyak 38 pasar desa dengan kondisi baik. Hal ini dapat tercapai karena adanya crosscutting kegiatan dimana program bantuan keuangan kepada desa diprioritaskan pada bantuan pengembangan pasar desa.
- Pengembangan kawasan pedesaan dan pengembangan potensi lokal desa, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli desa sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian desa. Pengembangan potensi desa juga ditunjang dengan fasilitasi bantuan keuangan kepada desa dengan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal desa.

1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Akhir renja

Pencapaian kinerja yang diukur terhadap realisasi kinerja sampai akhir periode renja 2023 akan dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan pendukungnya.

Tabel 3.5s
Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan s/d akhir periode renja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		
			6			7			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		
			K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4		Volume	Vol ume	Satua n	Vol ume	Sat uan	Vol ume	Sat uan	Vol ume	Sat uan			Volu me	Sat uan	
-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik		30	%	5,593,777,200									69.87	100	5,774,677,200
Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Desa) ;		184	Desa;	5,206,459,200									184.00	0	5,206,459,200
	jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa (Desa)		180	Desa											180.00	

Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD (Desa) ;		207	Desa;	180,765,500									207.00		187,265,500
	jumlah BPD yang dibina (Desa)		-	Desa										207.00		
Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan (Orang)		2,295	Orang	88,700,000									4,547.00		148,100,000

Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa (Desa)		207	Desa	117,852,500									414.00		232,852,500
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif		24.15	%	826,351,400									54.51		1,169,931,300
Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK (Kegiatan)		6	Kegiatan	797,585,100									12.00	100	1,104,665,000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjandal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu (Orang)		235	Orang	28,766,300									470.00	100	35,266,300
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan (Lembaga)		0	Lembaga	0									34.00	94	30,000,000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif		86.38	%	160,639,450									169.81		402,952,050

Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah Bumdes yang dibentuk (Bumdes) ;		24	Bumdes;	41,958,800									50.00	93	115,796,900
	Jumlah Bumdes yang dikembangkan (Bumdes)		149	Bumdes										327.00		
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan (kelompok)		-	Kelompok	-									171.00		39,322,500

Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	Jumlah event pengembangan produk unggulan (kali)		2	Kali	73,442,000									4.00		113,588,300
Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPM (Kegiatan)		3	Kegiatan	24,288,650									6.00		71,594,600
Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan (Kegiatan)		-	Kegiatan	-									-		-

Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan (pasar desa)		32	Pasar desa	10,000,000									61.00		51,699,750
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/ monev (kelompok)		179	Kelompok	10,950,000									179.00	0	10,950,000
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna		78.95	%	65,026,150									161.68		109,237,150

Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG (kelompok)		60	kelompok	65,026,150									122.00	97	109,237,150
Pengembangan Desa Mandiri Energi	Jumlah rumah tangga pemanfaat energi alternatif (Desa)		0	Desa	0									-	0	-
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pe mbangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat		100	%	395,182,000									100.00		528,842,759

Pengembangan Forum Warga Desa Membangun	Jumlah kegiatan pembinaan forum warga (Kegiatan)		0	Kegiatan	0										-	0	-
Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembangunan daerah dengan desa (Desa)		2	Desa	158,500,000										2.00	-	175,331,450
Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan (Kegiatan)		3	Kegiatan	77,282,000										6.00	100	167,110,869

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (kali)		2	kali	123,300,000									4.00		150,300,440
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa (Kegiatan)		0	Kegiatan	0									-		-
Jalin Matra					36,100,000									-	0	36,100,000

Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik		19.32	%	324,643,700										48.27		612,969,450
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa (Kegiatan)		5	Kegiatan	324,643,700										10.00	100	612,969,450
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat		76	Angka	313,203,822										153.46		594,914,193

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)		12	bulan	223,595,883									24.00	100	455,799,304
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas (bulan)		12	bulan	89,607,939									24.00	100	139,114,889
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		100	%	78,224,903									198.54		255,596,703

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)		1	jenis	12,000,000									1.00	0	111,374,300
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)		18	unit	66,224,903									36.00	100	144,222,403
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor (buah)		0	buah	0									-	0	-

Total & Rata-Rata Capaian														201.38	9,494,026,205
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik II %			50	%	636,988,220							110	%	3,443,403,298
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik II Desa			103	desa	636,988,220							227	Kegiatan	3,443,403,298

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa		3	Kegiatan	29,960,000									6	Kegiatan	57,960,000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		207	Desa	10,000,300									414	Desa	20,500,250
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa		3	Kegiatan	84,970,000									6	Kegiatan	86,609,250

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa		5	Kegiatan	139,411,220										10	Kegiatan	276,378,348
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa		4	Kegiatan	43,098,700										8	Kegiatan	2,463,210,650
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		207	Desa	53,000,000										414	Kegiatan	93,100,350

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa		6	Kegiatan	134,354,550									12	Kegiatan	204,026,400
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa		2	Kegiatan	7,998,650									4	Kegiatan	14,997,600
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		3	Kegiatan	25,988,100									6	Kegiatan	38,487,750

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa		3	Kegiatan	19,697,200									6	Kegiatan	33,696,700
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		3	Kegiatan	15,000,000									6	Kegiatan	25,500,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD		3	Kegiatan	17,509,500									6	Kegiatan	31,139,500

Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa II desa		6	Kegiatan	26,563,750									12	Kegiatan	51,566,650
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa		3	Kegiatan	9,640,000									6	Kegiatan	18,380,000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi desa dengan pihak ketiga		3	Kegiatan	16,923,750									6	Kegiatan	33,186,650

<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p>	<p>Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif II %</p>		<p>30</p>	<p>%</p>	<p>736,485,740</p>									<p>70</p>	<p>%</p>	<p>1,434,246,590</p>
---	--	--	------------------	-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------------------

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif II Lembaga		372	Lembaga	736,485,740											868	Lembaga	1,434,246,590
---	--	--	-----	---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------	---------------

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	235	Orang	21,883,500										470	Ora ng	39,333,250
--	--	-----	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------	------------

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan		36	Lembaga	27,000,000										72	Lembaga	47,984,000
--	--	--	----	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------	------------

<p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa</p>		<p>8</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>217,209,900</p>											<p>16</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>437,442,550</p>
<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan</p>		<p>68</p>	<p>Kelompok</p>	<p>49,476,700</p>											<p>136</p>	<p>Kelompok</p>	<p>89,242,950</p>

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong		2	Kali	11,273,790									4	Kali	41,279,340
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK		12	Kegiatan	409,641,850									24	Kegiatan	778,964,500

PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa		100	%	54,940,000									200	%	199,847,630
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		7	Kegiatan	54,940,000									14	Kegiatan	199,847,630
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa		2	Kegiatan	20,800,000									4	Kegiatan	38,207,880

Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa		2	Kegiatan	34,140,000									4	Kegiatan	79,103,300
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasaran Desa		3	Kegiatan	-									6	Kegiatan	82,536,450
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat II Skor		79	Skor	3,584,730,958									79	%	9,267,381,991

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		5	Dokumen	40,604,500									10	Dokumen	69,632,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		4	Dokumen	22,954,000									8	Dokumen	51,981,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun		1	Dokumen	17,650,500									2	Dokumen	17,650,500

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		44	Laporan	3,065,174,538									104	Laporan	6,466,211,855
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		26	Laporan	3,062,174,538									52	Laporan	6,291,752,405
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun		18	Laporan	3,000,000									36	Laporan	174,459,450

<p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</p>		<p>12</p>	<p>Bulan</p>	<p>2,000,000</p>											<p>12</p>	<p>Bulan</p>	<p>2,000,000</p>
<p>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p>	<p>Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</p>		<p>12</p>	<p>Bulan</p>	<p>2,000,000</p>											<p>12</p>	<p>Bulan</p>	<p>2,000,000</p>
<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</p>		<p>12</p>	<p>Bulan</p>	<p>273,479,420</p>											<p>24</p>	<p>Bulan</p>	<p>2,145,831,765</p>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		12	Bulan	7,998,950									24	Bulan	17,984,550
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		12	Bulan	101,527,170									24	Bulan	1,758,530,865
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia		12	Bulan	15,978,000									24	Bulan	30,971,200

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia		12	Bulan	26,993,150									24	Bulan	51,327,150
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia		12	Bulan	15,000,000									24	Bulan	126,829,900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		12	Bulan	52,412,150									21	Bulan	52,412,150

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Bulan	53,570,000									24	Bulan	107,775,750
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		12	Bulan	114,737,950									24	Bulan	251,537,821
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		12	Bulan	21,737,950									24	Bulan	49,274,429

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		12	Bulan	15,000,000									24	Bulan	38,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia		12	Bulan	78,000,000									24	Bulan	164,263,392
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		19	Unit	88,734,550									38	Unit	332,168,550

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia		17	Unit	65,702,600									34	Unit	138,552,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		1	Unit	15,031,950									2	Unit	34,047,250

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	Unit	8,000,000								2	Unit	168,918,800	
Total & Rata-Rata Capaian					5,039,708,668										14,396,446,159	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM					79	Skor	3,994,384,464	80.8	Skor	2,922,938,714	102.28	73.18	81	Skor	2,922,938,714

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun					5	Dokumen	41,000,000	5	Dokumen	11,924,550	100.00	29.08	5	Dokumen	11,924,550
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					2	Dokumen	23,000,000	2	Dokumen	10,329,500	44.91	44.91	2	Dokumen	10,329,500

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun					12	Laporan	18,000,000	12	Laporan	1,595,050	8.86	8.86	12	Laporan	1,595,050
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun					44	Laporan	3,376,459,958	44	Laporan	2,578,204,253	100.00	76.36	44	Laporan	2,578,204,253

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN					26	Laporan	3,373,459,958	26	Laporan	2,578,204,253	76.43	76.43	26	Laporan	2,578,204,253
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun					18	Laporan	3,000,000	-	Laporan	2,475,750	82.53	82.53	-	Laporan	2,475,750

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah					12	Bulan	250,773,200	12	Bulan	107,752,136	100.00	42.97	12	Bulan	107,752,136
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia					1	Paket	16,000,000	2	Paket	10,510,750	65.69	65.69	2	Paket	10,510,750

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia					1	Paket	66,033,200	2	Paket	19,963,150	30.23	30.23	2	Paket	19,963,150
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia					1	Paket	15,000,000	2	Paket	8,046,736	53.64	53.64	2	Paket	8,046,736

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia					1	Paket	30,000,000	1	Paket	10,262,000	34.21	34.21	1	Paket	10,262,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					12	Dokumen	4,740,000	12	Dokumen	4,387,900	92.57	92.57	12	Dokumen	4,387,900

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia					1	Paket	24,000,000	2	Paket	17,325,000	72.19	72.19	2	Paket	17,325,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	Laporan	95,000,000	2	Laporan	37,256,600	39.22	39.22	2	Laporan	37,256,600

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan					12	Bulan	178,619,000	12	Bulan	119,204,775	100.00	66.74	12	Bulan	119,204,775
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia					2	Laporan	40,000,000	3	Laporan	26,537,775	66.34	66.34	3	Laporan	26,537,775

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia					2	Laporan	29,900,000	3	Laporan	17,400,000	58.19	58.19	3	Laporan	17,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia					2	Laporan	108,719,000	3	Laporan	75,267,000	69.23	69.23	3	Laporan	75,267,000

<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>					19	Unit	147,532,306	19	Unit	105,853,000	100.00	71.75	19	Unit	105,853,000
<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia</p>					17	Unit	74,997,500	17	Unit	46,683,000	62.25	62.25	17	Unit	46,683,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia					1	Unit	25,000,000	2	Unit	17,809,000	71.24	71.24	2	Unit	17,809,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1	Unit	47,534,806	-	Unit	41,361,000	87.01	87.01	-	Unit	41,361,000

PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa					100	%	215,000,000	100.0	%	95,083,000	100.0	44.22	100	%	95,083,000
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa					7	Kegiatan	215,000,000	7	Kegiatan	95,083,000	100.0	44.22	7	Kegiatan	95,083,000

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa					2	Kegiatan	25,000,000	2	Kegiatan	12,572,500	50.29	50.29	2	Kegiatan	12,572,500
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa					2	Kegiatan	40,000,000	2	Kegiatan	4,777,750	11.94	11.94	2	Kegiatan	4,777,750

Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas sarana dan Prasaran Desa					3	Kegiatan	150,000,000	3	Kegiatan	77,732,750	51.82	51.82	3	Kegiatan	77,732,750
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa					100	%	52,721,650	120.6	%	43,705,800	120.64	82.90	121	%	43,705,800

Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa					6	Kegiatan	52,721,650	6	Kegiatan	43,705,800	100.00	82.90	6	Kegiatan	43,705,800
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa					3	Kegiatan	17,000,000	3	Kegiatan	14,325,950	84.27	84.27	3	Kegiatan	14,325,950

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi desa dengan pihak ketiga					3	Kegiatan	35,721,650	3	Kegiatan	29,379,850	82.25	82.25	3	Kegiatan	29,379,850
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik					70	%	5,208,570,266	70.0	%	3,562,752,763	100.00	68.40	70	%	3,562,752,763

<p>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<p>Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik</p>					<p>144</p>	<p>Desa</p>	<p>5,208,570,266</p>	<p>144</p>	<p>Desa</p>	<p>3,562,752,763</p>	<p>100.00</p>	<p>68.40</p>	<p>144</p>	<p>Desa</p>	<p>3,562,752,763</p>
<p>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<p>Jumlah Kegiatan Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintah Desa</p>					<p>3</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>55,000,000</p>	<p>3</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>14,530,200</p>	<p>26.42</p>	<p>26.42</p>	<p>3</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>14,530,200</p>

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa					207	Desa	41,969,316	207	Desa	20,518,800	48.89	48.89	207	Desa	20,518,800
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa					3	Kegiatan	9,050,350	3	Kegiatan	7,231,283	79.90	79.90	3	Kegiatan	7,231,283

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa					5	Kegiatan	200,000,000	5	Kegiatan	83,108,250	41.55	41.55	5	Kegiatan	83,108,250
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa					4	Kegiatan	3,688,506,200	4	Kegiatan	2,832,052,080	76.78	76.78	4	Kegiatan	2,832,052,080

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					207	Desa	65,000,000	207	Desa	7,333,050	11.28	11.28	207	Desa	7,333,050
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa					6	Kegiatan	90,078,500	6	Kegiatan	77,435,450	85.96	85.96	6	Kegiatan	77,435,450

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa					2	Kegiatan	791,965,900	2	Kegiatan	381,197,800	48.13	48.13	2	Kegiatan	381,197,800
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa					3	Kegiatan	37,000,000	3	Kegiatan	25,249,150	68.24	68.24	3	Kegiatan	25,249,150

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa					3	Kegiatan	25,000,000	3	Kegiatan	-	-	-	3	Kegiatan	-
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					3	Kegiatan	25,000,000	3	Kegiatan	14,405,000	57.62	57.62	3	Kegiatan	14,405,000

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD					3	Kegiatan	45,000,000	3	Kegiatan	-	-	-	3	Kegiatan	-
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa					4	Desa	-	#DIV/0!	Desa	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Desa	-

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa					207	Desa	135,000,000	207	Desa	99,691,700	73.85	73.85	207	Desa	99,691,700
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif					50	%	3,111,826,500	50.0	%	1,520,412,922	100.00	48.86	50	%	1,520,412,922

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif					621	Lem b aga	3,111,826,500	621	Lem bag a	1,520,412,922	99.92	48.86	621	Lem bag a	1,520,412,922
--	---	--	--	--	--	-----	-----------	---------------	-----	-----------	---------------	-------	-------	-----	-----------	---------------

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				235	Orang	30,000,000	235	Orang	16,060,100	53.53	53.53	235	Orang	16,060,100
--	--	--	--	--	-----	-------	------------	-----	-------	------------	-------	-------	-----	-------	------------

<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan</p>				<p>36</p>	<p>Lembaga</p>	<p>35,000,000</p>	<p>36</p>	<p>Lembaga</p>	<p>11,107,300</p>	<p>31.74</p>	<p>31.74</p>	<p>36</p>	<p>Lembaga</p>	<p>11,107,300</p>
<p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan</p>	<p>Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa</p>				<p>8</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>137,669,000</p>	<p>8</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>99,869,300</p>	<p>72.54</p>	<p>72.54</p>	<p>8</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>99,869,300</p>

kan Pendapata n Asli Desa																
Fasilitasi Pemerinta h Desa dalam Pemanfaat an Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan					68	Kel om pok	87,417,500	38	Kel om pok	11,726,900	13. 41	13. 41	38	Kel om pok	11,726,900

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong					2	Kali	2,171,740,000	5	Kali	902,296,250	41.55	41.55	5	Kali	902,296,250
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK					12	Kegiatan	650,000,000	12	Kegiatan	479,353,072	73.75	73.75	12	Kegiatan	479,353,072
Total & Rata-Rata Capaian								12,582,502,880			8,088,488,399					8,144,893,199

- Jumlah pameran produk UMKM pada tahun 2023 tidak dapat terealisasi dikarenakan masih dalam kondisi pemulihan ekonomi yang mengakibatkan adanya terjadi refocusing anggaran untuk kegiatan lain dibidang ekonomi.
- Jumlah Penerima Manfaat TTG yang diberikan pelatihan target Kinerja sampai akhir renja berjumlah 60 dan telah 100% terealisasi. Meskipun demikian keberhasilan capaian ini belum diikuti dengan pemanfaatan TTG.
- Jumlah pengelola pasar desa yang dilakukan pembekalan dan pembinaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pasar desa target kinerja sampai akhir renja 2023 adalah 38 pengelola pasar dan terealisasi 100 % yang tercapai.
- Jumlah Monev dan pelaporan Capaian kinerja UPKU target kinerja 179 kelompok dan terealisasi 171 kelompok atau 95,5 %.
- Jumlah sosialisasi Pilot Project BUMDes target kinerja sebanyak 5 kali dengan capaian realisasi 5 kali atau 100%. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmen Dinas PMD untuk menjadikan BUMDES sebagai pilar pokok lembaga ekonomi desa.

1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja dari Sasaran ini didukung dengan 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan penunjang terwujudnya target. Program dan kegiatan tersebut tersaji sebagai berikut:

NO	Program	Kegiatan
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa

Setelah melakukan pengukuran pencapaian kinerja dengan membandingkan capaian kinerja terhadap 3 (tiga) hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dianalisa bahwa upaya

pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian di pedesaan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah pasar desa dengan kondisi baik
Pasar desa yang merupakan sarana prasana penunjang perekonomian masyarakat desa perlu terus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Pada tahun 2023 terdapat 55 pasar desa di Kabupaten Magetan, dari jumlah tersebut Dinas PMD menargetkan sebanyak 37 pasar desa dengan pengelolaan yang baik, dan tercapai sebanyak 38 pengelola pasar desa dengan kondisi baik atau 102,7 dari target.
2. Jumlah desa yang memiliki BUMDES aktif
Pada tahun 2023 ditargetkan setiap desa telah membentuk bumdes, dari 207 desa di Kabupaten Magetan telah terbentuk 207 Bumdes atau 100 % dari target, dan diharapkan dari Bumdes yang ada ditargetkan sebanyak 94 Bumdes berkembang dan tercapai sebanyak 95 bumdes atau 101 % dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan mulai tumbuhnya kesadaran Pemerintah Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes sebagai pilar penunjang tercapainya perekonomian desa yang baik serta pembinaan dan bantuan modal dalam wujud bantuan keuangan kepada desa dari pemerintah Kabupaten Magetan untuk pengembangan Bumdes.
3. Prosentase Jumlah pelaku kelompok yang menggunakan TTG
Target jumlah pelaku kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna pada tahun 2023 sebanyak 60 kelompok. Dinas PMD melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tersebut sehingga pada tahun 2023 tercapai sebanyak 60 kelompok masyarakat yang memanfaatkan medapatkan pembinaan dan pelatihan teknologi tepat guna. Kedepan Desa juga diharapkan membantu dalam pengembangan TTG melalui anggaran desa sehingga semakin tumbuh dan berkembang para pelaku kelompok usaha ekonomi masyarakat didesa yang menerapkan teknologi tepat guna.
4. Penguatan kelembagaan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Pedesaan. UPK merupakan unit pengelola keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam khusus perempuan didesa yang dilahirkan dari program PNPM, aset berupa dana simpan pinjam yang dikelola saat ini di kabupaten magetan mencapai 15 milyar. Dengan besarnya jumlah aset yang ada diharapkan kedepan dapat mampu mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas PMD dalam rangka mengamankan dan

memanfaatkan aset tersebut adalah dengan melakukan tranformasi dari UPK dan lembaga ekonomi lainnya menjadi BUMDes bersama.

1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan ini, indikator kinerja sasaran bisa digolongkan **telah** tercapai secara efisien. Kondisi ini dilihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 sebesar **100%** lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar **95,86%**, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Jumlah	Dana	Jumlah	Dana	Jumlah	Dana
Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik II %	Persen	70	5.208.570.266	70	4.802.881.237	100	92,18
Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa	persen	100	52.721.650	100	51.572.350	100	97,82
Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif	persen	50	3.111.826.500	50	2.966.045.822	100	95,36
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa	persen	100	215.000.000	100	210.914.850	100	98,10
Rata-Rata Capaian Kinerja						100	95,86

Adapun upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan tenaga ahli dari pendamping program, kader-kader pemberdayaan desa dan pihak swasta (perbankan) melalui kerjasama kegiatan dalam pengembangan BUMDes.

1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebanyak 4 program dan 4 kegiatan dan dapat diuraikan dibawah ini:

Program Administrasi Pemerintahan Desa:

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.208.570.266,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 4.802.881.237,- dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan 92,18%, yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa, lembaga pemerintahan desa, pengembangan dan pembinaan BUMDesa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi desa.

Program Peningkatan kerjasama Desa:

Untuk mewujudkan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 52.721.650 dan terealisasi sebesar Rp. 51.572.350 atau 97,82%. Anggaran ini digunakan untuk melakukan pelatihan kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dan kerjasama antar desa. Wujud kerjasama antar desa diantaranya adalah pengembangan kawasan pedesaan dalam rangka pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan asli desa.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat:

Dalam program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.111.826.500 dan terserap sebesar Rp 2.966.045.822 atau sebesar 95,36 %. dalam program ini difokuskan pada pembinaan kelembagaan desa, diantaranya PKK, Posyandu, LPM, RT/RW, Karang taruna dan lembaga adat desa.

Program Penataan Desa :

Pada program penataan desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 215.000.000 dan terealisasi sebesar RP. 210.914.850 atau sebesar 98,10%. Sebagian besar dalam kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan dalam rangka penataan desa dan pemenuhan sarana dan prasarana desa. Pada tahun 2022 terdapat 426 titik bantuan keuangan kepada desa yg tersebar dalam 207 desa di 18 kecamatan se Kabupaten Magetan.

2. Tujuan Meningkatkan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat

Tujuan Meningkatkan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa” yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni:

- 1) Jumlah KPM Aktif
- 2) Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
- 3) Jumlah kegiatan fasilitasi musyawarah desa

2.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa” yang dicapai melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan target & realisasi Sasaran 2 Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah KPM aktif	144	105	72,9 %	Cukup Berhasil
Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	100	100	100 %	Berhasil
Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	60	40	82 %	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja				Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa disimpulkan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut **berhasil**, dengan rata-rata capaian sebesar **84,9 %**.

2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023

Berikut ini akan diuraikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 untuk sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa :

Tabel 3.9
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR	REALISASI (2022)	TARGET (2023)	REALISASI (2023)
Jumlah KPM aktif	105	150	140
Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	100	100	100

Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	40%	60%	50%
---	-----	-----	-----

2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja dari Sasaran ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan penunjang terwujudnya target, Kegiatan – kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Penataan Desa
- 2) Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Setelah melakukan pengukuran pencapaian kinerja dengan membandingkan capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dianalisa bahwa upaya pencapaian sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa berdasarkan indikator sebagai berikut :

- Jumlah KPM aktif realisasi tahun 2022 adalah 105 orang, target 2023 adalah 150 dengan capaian jumlah KPM aktif sebanyak 140. Meskipun belum mencaai target yang ditetapkan namun hal ini sudah masuk dalam kategori berhasil dikarenakan adanya sinergitas dengan pemerintah propinsi jawa timur dan lembaga pengembangan sumberdaya manusia propinsi jawa timur dalam upaya memberikan pelatihan terhadap kader pemberdayaan masyarakat desa. .
- Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang tahun 2021 dan capaian target 2022 adalah sama 100 %. Membuktikan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tetap terjaga dan kesadaran terlibat dalam perencanaan pembangunan meningkat
- Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik pada tahun 2022 dari target 60 % tercapai realisasi sebesar 50 % atau sebanyak 106 desa dari total 207 desa di Kabupaten Magetan. Secara capaian masih dibawah target yang ditetapkan akan tetapi secara kuantitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pembinaan terhadap perangkat desa khususnya pengelola keuangan desa.
- b. Sosialisasi secara intens terkait peraturan pengelolaan keuangan desa
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan (Manlak) pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa lebih mudah memahami peraturan-peraturan terkait desa

2.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan ini, indikator kinerja sasaran bisa digolongkan **telah** tercapai secara efisien. Kondisi ini dilihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 capaian dana sebesar **95,86%**. sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Sasaran program/kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Jumlah	Dana	Jumlah	Dana	Jumlah	Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SKor	79	3.994.384.464	80,8	3.878.571.143	114	97,10
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	70	5.208.570.266	70	4.802.881.237	100	92,18
Program Peningkatan Kerjasama Desa	persen	100	52.721.650	100	51.572.350	100	97,82
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persen	50	3.111.826.500	50	2.966.045.822	100	95,36
Program Penataan Desa	persen	100	215.000.000	100	210.914.850	100	98,10
Rata-Rata Capaian Kinerja						100	95,86

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran yaitu pada sub kegiatan Penetapan Batas Desa. Adapun upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan tenaga ahli dari pendamping program, pendamping desa, kader-kader pemberdayaan desa dan pihak swasta berupa CSR dalam penyelenggaraan kegiatan.

3. Tujuan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Tujuan Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dijabarkan dalam Sasaran yaitu “Meningkatnya kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa” yang diukur melalui indikator yakni:

- 1) Persentase Lembaga dan Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik
- 2) Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif

Adapun uraian pencapaian target kinerja atas tujuan dan sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja yang diukur terhadap realisasi kinerja sampai akhir periode renja 2023 akan dilihat pada tabel berikut.:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
	Vol	Sat	Rp	Vol	Sat	Rp	Vol	Rp
Program Administrasi Pemerintahan Desa	70	%		50	%			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	144	Desa	5.208.570.266	106	Desa	4.801.439.037	73,6	68,4
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	50	%		50	%		100	

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	621	lembaga	3.111.826.500	621	lembaga	2.968.488.122	100	95,36
--	-----	---------	---------------	-----	---------	---------------	-----	-------

3.2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan realisasi kinerja tahun 2023 untuk sasaran Meningkatnya kinerja lembaga dan pemerintahan desa :

Tabel 3.14
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR	TARGET (2023)	REALISASI (2023)	Capaian
Persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	60	50	83,3
Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50	50	100

Realisasi kinerja pada akhir renja tahun 2023 ada yang menunjukkan keberhasilan dan maupun kekurangan atau tidak berhasil mewujudkan target, dengan uraian sasaran capaian kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah seluruh perangkat desa di kabupaten magetan sebanyak 2310 orang berdasarkan SOTK desa. Dari jumlah tersebut pada tahun 2023 terdapat 55 orang yang berhenti baik karena purna tugas dan hal lainnya dan jumlah anggota lembaga pemerintah

desa (BPD) sebanyak 1575 dan terdapat pergantian antar waktu (PAW) anggota bPD pada tahun 2023.

- Dari total seluruh lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik sebanyak 50 %. Hal ini dihitung berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh perangkat desa dikabupaten magetan.
- Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari PKK, Posyandu, karang taruna, RT, RW dan LPM. Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 60 % dapat berfungsi secara aktif sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa tersebut. jumlah keseluruhan anggota lembaga kemasyarakatan desa dikabupaten Magetan sebanyak 1242 lembaga, realisasi dari target tersebut pada tahun 2023 sebesar 50 % sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 % (sangat Berhasil).
- Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan aset dengan baik tahun 2022 adalah 36 desa, sementara target tahun 2023 adalah 207 desa namun realisasi sebanyak 97 desa. Terjadi perkembangan meskipun belum sesuai yang diharapkan. Analisa ketidak berhasilan indikator adalah disebabkan oleh lemahnya kapasitas perangkat desa dalam memahami pengelolaan asset.
- Jumlah TP PKK desa yang aktif sesuai target baik tahun 2022 dan 2023 sebanyak 207. Sebanyak 207 PKK aktif tersebut keseluruhan difasilitasi oleh pemerintah desa
- Prosentase SDM perangkat desa yang memenuhi persyaratan tahun 2023 realisasinya adalah 80% dari target 100%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh mekanisme pengisian perangkat desa belum memenuhi kuota dan standar kualitas SDM yang diinginkan serta minimnya pembekalan terhadap perangkat desa karena keterbatasan anggaran.

3.2. REALISASI ANGGARAN

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi

kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan juga disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara *ex-officio* di jabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam melaksanakan seluruh program/kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran tahun 2023

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	3.994.384.464	3.878571.143	97,10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	41.,000,000	36.415.200	88,82
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	23,000,000	22.976.600	99,90
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	18,000,000	13.438.600	74,66

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang di susun	3,376.459.958	3,314,556,052	98.17%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3,373,459,958	3,312,080,302	98.18%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	3,000,000	2,475,750	82.53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	250,773,200	215,292,786	85.85%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	16,000,000	14,653,100	91.58%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	66,033,200	61,668,150	93.39%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	15,000,000	14,997,086	99.98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	30,000,000	19,791,000	65.97%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	24,000,000	23,674,950	98.65%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		4,740,000	4,387,900	92.57%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,000,000	76,120,600	80.13%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	178,619,000	172,475,305	96.56%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	40,000,000	35,056,305	87.64%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	29,900,000	28,700,000	95.99%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	108,719,000	108,719,000	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	147,532,306	139,831,800	94.78%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	74,997,500	74,287,800	99.05%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	25,000,000	24,183,000	96.73%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47,534,806	41,361,000	87.01%
Program Penataan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa	215,000,000	210,914,850	98.10%
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	215,000,000	21,675,500	86.70%
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa	25,000,000	39,446,500	98.62%
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa	40,000,000	149,792,850	99.86%
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasaran Desa	150,000,000	210,914,850	98.10%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa	52,721,650	51,572,350	97.82%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa	52,721,650	51,572,350	97.82%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa	17,000,000	16,325,950	96.04%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi desa dengan pihak ketiga	35,721,650	35,246,400	98.67%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	5,208,570,266	4,802,881,237	92.18%

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik	5,208,570,266	4,802,881,237	92.18%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintah Desa	55,000,000	52,641,200	95.71%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	41,969,316	20,518,800	48.89%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa	9,050,350	7,231,283	79.90%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	200,000,000	192,890,970	96.45%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa	3,688,506,200	3,415,562,978	92.60%
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	65,000,000	33,800,550	52.00%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	90,078,500	88,756,100	98.53%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	791,965,900	735,663,100	92.71%
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	37,000,000	31,759,150	85.84%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	25,000,000	20,876,406	83.51%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25,000,000	24,820,000	99.28%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	45,000,000	44,385,700	98.63%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	0	0	0.00%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	135,000,000	133,975,000	99.24%

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif	3,111,826,500	2,966,045,822	95.36%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif	3,111,826,500	2,966,045,822	95.36%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	30,000,000	26,026,100	86.75%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	35,000,000	30,042,300	85.84%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa	137,669,000	135,149,700	98.17%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan	87,417,500	84,201,500	96.32%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	2,171,740,000	2,051,034,450	94.51%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	650,000,000	639,591,772	98.40%



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Secara umum dari keseluruhan sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magetan tahun 2023 Rata-rata Capaian kinerja yang diraih dari seluruh indikator capaian program dan kegiatan adalah 96,42% masuk kategori **Sangat Berhasil**, namun demikian ada beberapa yang belum bisa mencapai target secara maksimal diantaranya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa, dari target yang ditetapkan sebesar 60 % hanya terealisasi sebesar 50%, hal ini disebabkan kurangnya pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa dikarenakan keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan aparatur desa, serta adanya beberapa perangkat desa dan kepala desa baru yang belum mendapat pembinaan. Kedepan tentunya ini akan disikapi dengan melakukan pembinaan dan pelatihan serat pembekalan terhadap kepala desa dan perangkat desa baru agar mampu mencapai target yang sudah ditetapkan.

Dibidang ekonomi desa meskipun juga terdapat beberapa kendala terkait upaya peningkatan ekonomi desa, namun dari target yang ditetapkan telah memenuhi apa yang diharapkan, pembentukan dan pengembangan BUMDes serta peningkatan pengelolaan pasar desa sudah berjalan sesuai harapan, akan tetapi kedepan tentunya hal ini perlu lebih ditingkatkan dan perlu juga adanya dukungan anggaran yang lebih masif dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa.

Kegiatan Pemberdayaan ekonomi Perdesaan adalah integrasi dari program penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan BUMdesa, pengembangan Teknologi tepat guna dan juga peningkatan kuantitas kerjasama desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan tahun 2023 yang menggambarkan capaian kinerja terhadap indikator kinerja organisasi.

Magetan, Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. MAGETAN



EKO MURKANTO, S.IP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750527 199311 1 001